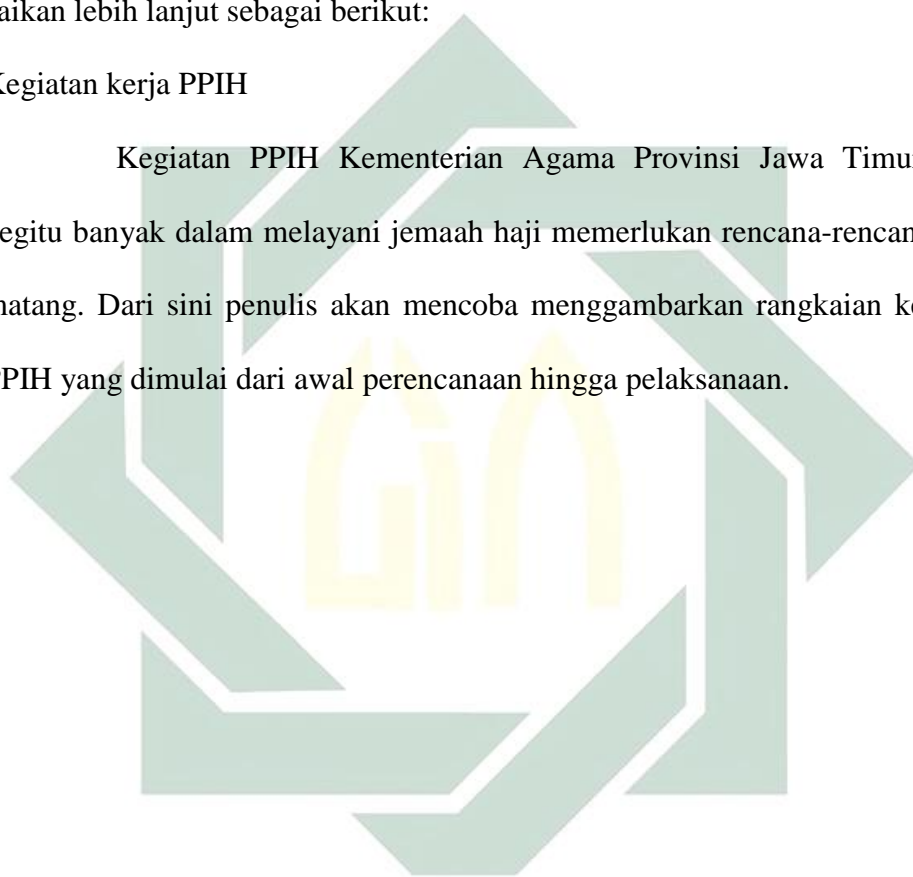


Perencanaan dan Pelaksanaan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur”

Deskripsi tentang Sistem Perencanaan Dan Pelaksanaan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Kegiatan kerja PPIH

Kegiatan PPIH Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang begitu banyak dalam melayani jemaah haji memerlukan rencana-rencana yang matang. Dari sini penulis akan mencoba menggambarkan rangkaian kegiatan PPIH yang dimulai dari awal perencanaan hingga pelaksanaan.



- (b) Meja untuk penerimaan lembar asli BPIH warna Biru untuk pihak penerbangan (Saudi Arabian Airlines).
 - (c) Meja untuk pemeriksaan kesehatan.
 - (d) Meja untuk pembagian kartu akomodasi dan gelang identitas.
 - (e) Meja untuk pemanggilan jemaah.
 - (f) Disediakan ruang khusus untuk pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji wanita usia subur (WUS)
 - (g) Meja untuk Bea dan Cukai.
 - (h) Mesin *x-ray* untuk pemeriksaan barang (Angkasa Pura).
- (3) Pemeriksaan barang bawaan (koper besar) melalui *x-ray* untuk selanjutnya menerima label bagasi.
- (4) Dilakukan penyambutan penerimaan jemaah dan penjelasan tentang hak dan kewajiban jemaah selama di Asrama Haji Surabaya oleh petugas penerimaan, dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan bagi jemaah Resiko Tinggi dan Wanita Usia Subur (WUS) dan validasi SPMA oleh SSKOHAT.
- (5) Penerimaan gelang identitas, penerimaan Kartu Akomodasi, e-BKJH dan penyerahan obat-obatan ringan dan masker untuk jemaah.

Haji selanjutnya berhenti dibelakang bus yang lainnya, begitu seterusnya sampai 10 bus sudah terisi oleh calon jemaah haji. Untuk jemaah haji yang memerlukan perlakuan khusus, misalnya jemaah yang resti atau lansia akan dinaikkan ke dalam mobil pemantau PPIH Embarkasi atau mobil Ambulans, Jika seluruh calon jemaah haji naik keatas bus, Petugas pemberangkatan mengumumkan melalui pengeras suara, kepada calon jemaah haji yang mungkin saja turun untuk segera naik ketas bus, karena bus akan segera diberangkatkan.

Dipimpin oleh petugas pemberangkatan, melalui pengeras suara, petugas mengucapkan kalimat, “Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, jemaah calon haji kloter satu diberangkatkan ke Tanah suci, semoga selamat dan menjadi Haji yang Mabruur, Amin, Amin Ya Rabbal Alamin” selanjutnya diiringi bacaan talbiyah dari hasil rekaman, sampai seluruh rombongan keluar dari gerbang Asrama Haji.

Untuk angkutan jemaah haji dari Asrama Haji ke Bandara Juanda menggunakan bus ber AC yang disediakan oleh Pihak Penerbangan, yaitu memakai Bus DAMRI, satu bus didampingi petugas dari Dinas Perhubungan (kru bus) dan petugas dari Saudia Arabian Airlines. Jalur yang akan di lewati juga sudah ditentukan

Narasumber diatas menyatakan bahwa kepala bidang diberikan kewenangan dalam melakukan rapat koordinasi antara PPIH. Rapat koordinasi antara PPIH dilakukan untuk mensosialisasikan pembagian tugas kerja anggota. Dengan dilakukannya rapat koordinasi antar PPIH diharapkan semua anggota PPIH bisa mengetahui apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

Dengan dilakukannya rapat koordinasi antar Embarkasi maupun antar anggota PPIH, diharapkan dapat mensinergikan penyelenggaraan haji yang baik.

3. Sistem Pelaksanaan

Pelaksanaan memiliki fungsi yang besar terhadap terlaksananya rencana yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan haji tahun 2015 PPIH sebagai pelaksana dari rencana yang telah ditetapkan. Dari semua PPIH yang ada di Indonesia memiliki model pelaksanaan tersendiri, dengan menyesuaikan keadaan lapangan serta SDM yang dimilikinya. PPIH Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa model pelaksanaan yang akan peneliti uraikan dibawah ini.

Sistem pelaksanaan haji yang diterapkan pada PPIH Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur semuanya sudah terangkum dalam SOP. Dari kegiatan pelaksanaan haji, SOP sebagai patokan karyawan untuk bertindak. Selain itu dengan adanya SOP menggambarkan proses-proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang akan dijadikan pedoman/acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan bidang/seksi

direkrut lagi. Motivasi yang diberikan pimpinan dari pernyataan narasumber tersebut lebih menitikberatkan pada aspek materi dunia dan kepuasan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian (Analisis Data)

Berdasarkan pada data dan teori yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka penulis mencoba untuk menganalisa tentang Sistem Perencanaan Dan Pelaksanaan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan teknik yang sudah penulis jelaskan pada bab sebelumnya.

Pembahasan penelitian ini akan penulis padukan dari sistem perencanaan dan pelaksanaan secara teori dengan sistem perencanaan dan pelaksanaan yang didapatkan penulis pada obyek penelitian yakni, PPIH Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. dari hal tersebut akan muncul sistem perencanaan dan pelaksanaan yang di jalankan oleh PPIH Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Model penelitian ini yang menggunakan kualitatif deskriptif akan menguraikan data-data yang sudah didapat penulis ketika proses penggalian data di lapangan. Dari data tersebut akan di telaah dengan teori yang dipakai, jika data yang didapat sesuai dengan teori yang dipakai maka teori tersebut masih berlaku akan tetapi jika data yang didapatkan berbeda dengan obyek penelitian maka bisa memunculkan suatu teori baru. Dalam kategori sistem perencanaan dan pelaksanaan.

Menetapkan tujuan seperti yang dijelaskan diatas yakni harus sudah tersusun pada tahun sebelumnya. Masa operasional PPIH berlangsung selama dua bulan pada musim haji, dan penetapan tujuan untuk rencana operasional tersebut sudah tersusun pada tahun sebelumnya.

Dalam penetapan tujuan ada beberapa pertimbangan yang dilakukan PPIH Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. pertimbangan tersebut adalah adanya indikator keberhasilan dalam menjalankan operasional ibadah haji. Indikator tersebut meliputi, pelayanan umum, pelayanan kesehatan dan pelayanan bimbingan ibadah. tiga indikator tersebut menjadi suatu pertimbangan PPIH dalam menetapkan tujuan.

2) Anggaran berbasis kinerja

Anggaran berbasis kinerja adalah sebuah sistem baru yang diterapkan PPIH Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Anggaran berbasis kinerja tersebut berorientasi pada pekerjaan. Karena PPIH adalah organisasi dibawah naungan Kementerian Agama milik pemerintah jadi harus menyusun rangkaian kegiatan terlebih dahulu kemudian baru anggaran bisa turun. Bisa dikatakan petugas PPIH harus lebih mandiri dan dapat merancang kegiatan yang semaksimal mungkin dalam satu tahun kedepan.

Dengan adanya sistem anggaran berbasis kinerja tersebut PPIH Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur didukung dengan sumber daya manusia yang baik dan sesuai dengan pekerjaan. Sumber daya manusia tersebut antara lain lulusan S1, S2 dan ada juga S3 dari berbagai keahlian.

Anggaran berbasis kinerja tersebut lebih berorientasi pada pekerjaan, jika pekerjaan yang dilakukan sedikit maka anggaran yang didapat juga sedikit sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

3) Penyusunan kegiatan

Penyusunan kegiatan adalah hal paling padat yang dilakukan oleh PPIH Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Pada bagian ini PPIH menyusun semua rangkaian kegiatan yang akan di aplikasikan pada waktu operasional haji. Penyusunan kegiatan operasional haji tersebut meliputi pemberangkatan dan pemulangan jemaah. Dalam penyusunan tersebut terdapat rincian-rincian kegiatan yang dijalankan PPIH, misalkan penyambutan jemaah di asrama haji, penyiapan akomodasi transportasi, *catering* dan pemantapan manasik haji di asrama.

Penyusunan panitia juga dilakukan oleh PPIH, mulai dari panitia inti dan panitia pembantu. Panitia yang terdapat pada PPIH Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tidak ada ikatan dalam operasional setiap tahunnya maka setiap akan ada operasional haji dibentuk panitia. Dalam pembentukan panitia PPIH setiap tahunnya berbeda, hal tersebut terjadi karena keadaan di lapangan yang selalu berganti. Pada tahun 2015 anggota PPIH melibatkan dari berbagai unsur, diantaranya, ormas keagamaan Nahdlatul Ulama' Muhammadiyah instansi UIN Sunan Ampel Surabaya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan MUI Jawa Timur. Hal tersebut seperti yang didapatkan penulis dari hasil wawancara dibawah ini

"Juga ada Tim Konsultan dan pemantauan terdiri dari ormas Islam yaitu PWNNU Jawa Timur, PW Muhammadiyah Jawa

di pakai serta referensi-referensi lain yang kompeten di bidang sistem pelaksanaan.

Pengembangan dari teori pelayanan publik tersebut penulis mendapatkan beberapa data tentang sistem pelaksanaan yang ada pada PPIH Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dari analisis ini penulis akan menjawab rumusan masalah yang kedua yakni, bagaimana sistem pelaksanaan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dari data yang didapatkan oleh penulis muncul tiga sistem pelaksanaan yang ada pada PPIH Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yakni, sosialisasi SOP, pembekalan dan instruksi langsung. Data tersebut akan penulis analisis sesuai dengan teori dan penyajian data yang telah diuraikan oleh penulis diatas.

1) Sosialisasi SOP

Pelaksanaan sosialisasi SOP yang dilakukan oleh PPIH Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur diberikan kepada semua anggota PPIH. Sosialisasi SOP dilakukan pada waktu pemberangkatan dan pemulangan, sosialisasi tersebut diberikan dua hari sebelum pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan. Sosialisasi SOP diberikan kepada seluruh anggota PPIH dengan tujuan semua anggota PPIH mengetahui apa yang menjadi tugasnya. Semua tugas anggota PPIH sudah terangkum dalam SOP tersebut, jadi setiap apa yang dikerjakan anggota PPIH berpatokan pada SOP. Misalkan bagian dokumen yang tugasnya mendata paspor jemaah dengan cara mengecek pada *server* SSKOHAT dan

data dilapangan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Penggalan data tersebut penulis mengacu pada teori yang dipakai. Pada penyajian data di atas yang telah dipaparkan oleh penulis sudah terlihat apa saja yang menjadi sistem pelaksanaan PPIH Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Pada bagian ini penulis memaparkan dengan jelas dan lebih terarah pada bagian sistem pelaksanaan yang ada pada PPIH.

Dari tiga hal yang diperoleh penulis tersebut ada empat karakteristik teori yang masuk didalamnya diantaranya, *responsiveness*, *transparency*, *consensus orientation* dan *efektiviness*. Dari pembahasan sosialisasi SOP yang terkandung didalamnya termasuk adanya unsur *transparency*, yakni terbuka kepada semua anggota PPIH dengan memberikan arahan-arahan tentang pekerjaannya.

Dengan adanya pembekalan yang dilakukan oleh PPIH akan memberikan keterampilan tersendiri kepada anggota. Selain itu anggota PPIH akan lebih efektif dalam menjalankan pekerjaannya karena telah mengetahui apa yang harus dikerjakan dan cara-caranya. Dari sistem pelaksanaan tersebut karakteristik teori *efektiviness* yang mempunyai arti pengelolaan sumber daya publik secara berdaya guna dapat dikatakan termasuk dalam pembekalan PPIH.

Hasil penelitian yang ketiga yakni adanya instruksi langsung. Dengan adanya instruksi langsung ada dua karakteristik teori yang pemahamannya sama yakni, *responsiveness* dan *consensus orientation*.

Instruksi langsung terjadi karena PPIH cepat tanggap dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji. Dengan instruksi langsung juga mengindikasikan bahwa PPIH lebih mementingkan pelayanan jemaah.

Teori yang dipakai penulis pada pembahasan sistem pelaksanaan ini adalah teori pelayanan publik yang meliputi Sembilan hal diantaranya, *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, strategic vision*. Dari acuan teori yang dipakai penulis tersebut mengindikasikan bahwa tidak semua teori yang di pakai sama dengan hasil yang didapat oleh penulis dilapangan. Hasil yang didapat penulis di lapangan sistem pelaksanaan ada tiga hal yakni, sosialisasi SOP, pembekalan dan instruksi langsung. Dari hasil yang didapat penulis tersebut empat karakteristik teori yang dirasa penulis sama yakni *responsiveness, consensus orientation, transparency* dan *efektiviness*.